

**PENGARUH HASIL PEMERIKSAAN BPK RI DAN KINERJA KEUANGAN
DAERAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DAERAH**

Violita Mayang Kayani¹, Titik Aryati²

Universitas Trisakti

Correspondence		
Email: 023002214025@std.trisakti.ac.id ; titik.aryati@trisakti.ac.id	No. Telp:	
Submitted 13 Juli 2024	Accepted 16 Juli 2024	Published 23 Juli 2024

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis hasil pemeriksaan BPK berupa opini audit dan jumlah temuan pemeriksaan BPK serta kinerja keuangan daerah dalam laporan keuangan terhadap kesejahteraan masyarakat daerah tersebut yang tergambar dalam indeks pembangunan manusia. Penelitian menguji pengaruh opini audit BPK RI dan kinerja keuangan daerah serta pengaruh jumlah temuan audit BPK terhadap kesejahteraan masyarakat. Data dalam penelitian ini di dapat dari ikhtisar hasil pemeriksaan BPK RI, laporan keuangan pemerintah daerah provinsi serta hasil indeks pembangunan manusia sejak tahun 2018 sampai dengan 2022 dengan populasi dari 34 provinsi di Indonesia. Pengujian hipotesis menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menemukan bahwa opini audit memberikan pengaruh atas kesejahteraan masyarakat, jumlah temuan pemeriksaan berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat serta kinerja keuangan memberikan pengaruh atas kesejahteraan masyarakat. Implikasi dari hasil penelitian ini adalah perhatian atas jumlah temuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, perlunya efektivitas dan efisiensi atas pengelolaan kinerja keuangan pemerintah daerah dapat ditingkatkan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

1. Pendahuluan

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) mengamanatkan berbagai tujuan negara yang salah satunya adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapainya, berbagai langkah telah dilakukan, salah satunya dengan menerapkan sistem desentralisasi dan otonomi daerah. Reformasi menjadi titik balik peran negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembagian kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Landasan hukum yang mengatur pembagian daerah ini terus diperbaharui hingga lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintah daerah. Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Diharapkan melalui Undang-Undang ini, pemberian kewenangan melalui otonomi yang lebih besar kepada pemerintah daerah dapat mempercepat terwujudnya masyarakat yang sejahtera dengan meningkatnya pelayanan publik (Simandjuntak, 2012).

Otonomi daerah membawa konsekuensi adanya pembagian sebagian wewenang pemerintah pusat kepada daerah (Hadi & Saragih, 2013). Desentralisasi fiskal diimplementasikan dengan melimpahkan tugas, kewenangan, dan pendanaan kepada daerah untuk menyelesaikan tanggung jawab tersebut.

Pengguna anggaran pendapatan dan belanja daerah wajib melaporkan penggunaan dan pengelolaan keuangan daerah secara tertulis, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara. Standar akuntansi pemerintahan (Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005) menjelaskan penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) berperan dalam penyajian informasi serta media akuntabilitas bagi semua pemangku kepentingan.

Penilaian atas kinerja keuangan suatu daerah teramat penting karena penggunaan keuangan daerah yang optimal dapat dikaitkan dengan kemajuan pembangunan di wilayah tersebut.

Sebagai bentuk pertanggungjawaban penggunaan keuangan negara oleh daerah, LKPD harus diperiksa dan mendapatkan opini audit dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) sebagaimana diamanatkan konstitusi. Berdiri sejak 1 Januari 1947, BPK RI konsisten melakukan pemeriksaan dan memberikan opini atas laporan keuangan pemerintah pusat (LKPP) dan daerah setiap tahun. BPK RI memiliki empat kategori opini yaitu wajar tanpa pengecualian (WTP) sebagai opini tertinggi, wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP). Hingga tahun 2023, berdasarkan laporan BPK RI, dari 542 pemda di Indonesia, hanya 23 pemda yang terdiri atas 22 pemerintah kabupaten (Pemkab) dan satu pemerintah kota (Pemkot) di tujuh provinsi yang belum pernah menerima opini WTP (Faqih, 2023). Hasil perolehan opini audit ini seharusnya mengindikasikan bahwa secara umum pemerintah daerah telah membuat laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintah, cukup dalam pengungkapan, memiliki SPI yang efektif dan patuh terhadap peraturan perundang-undangan. Melihat kondisi tersebut, seharusnya tujuan negara dalam menyejahterakan masyarakatnya dapat terpenuhi. Namun, dalam kenyataannya saat ini, Indonesia masih menjadi peringkat ke-4 negara se ASEAN dalam tingkat persentase penduduk miskin. Indonesia yang masih menjadi peringkat ke-4 ini menjadi indikasi nyata bahwa kesejahteraan masyarakat Indonesia masih berada di bawah negara di ASEAN.

Penelitian Adinata (2023) menemukan bahwa kesejahteraan masyarakat yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dipengaruhi oleh opini audit. Di satu sisi, penelitian lain yang dilakukan Saragih dan Hasibuan (2020) menyimpulkan tidak adanya pengaruh opini BPK pada kesejahteraan Masyarakat serta dalam penelitian Jannah (2020) menyatakan bahwa tidak adanya pengaruh temuan yang dihasilkan BPK terhadap kesejahteraan masyarakat.

Selain penilaian LKPD melalui output audit BPK, penilaian atas kinerja keuangan daerah dapat langsung dinilai dengan melakukan analisis atas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian sebelumnya yang dilakukan Saragih dan Hasibuan (2020) serta penelitian Putry (2017) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu daerah berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. Namun, dalam penelitian lain yang dilakukan Alam dan Adib (2016) menyimpulkan bahwa tidak semua rasio dalam perhitungan kinerja keuangan pemerintah daerah mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menguji apakah terdapat pengaruh opini audit dan jumlah temuan serta kinerja keuangan pemerintah daerah terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat daerah tersebut. Faktor yang digunakan dalam penelitian ini diambil dari penelitian Adinata (2023) opini audit dan jumlah temuan audit serta kesejahteraan masyarakat dengan faktor lain dari penelitian Saragih dan Hasibuan (2020) berupa kinerja keuangan pemerintah daerah.

2. Pengembangan Hipotesis

2.1 Pengaruh Opini BPK terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Opini Pemeriksaan BPK yang baik berupa WTP ataupun WDP dapat diartikan bahwa keuangan pemerintah daerah telah dikelola dengan baik. Dengan laporan keuangan yang beropini baik, masyarakat juga mendapatkan informasi bahwa keuangan daerah dikelola pemerintah sesuai dengan tata kelola dan praktik pengelolaan keuangan yang baik, transparan, dan akuntabel. Pengelolaan keuangan yang baik juga turut serta mencegah terjadinya fraud maupun kebocoran, sehingga pengelolaan keuangan yang baik akan membantu menjamin hasil-hasil pembangunan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tepat sasaran. Dalam penelitian Musahadah dan Amarulloh (2018) menjelaskan bahwa konsep kesejahteraan masyarakat memiliki korelasi yang sangat relevan dengan performa manajemen keuangan pemerintah yang dinilai dengan Opini BPK. Hubungan opini dan kesejahteraan masyarakat juga dijelaskan dalam penelitian Adinata (2023) yang menemukan variabel kesejahteraan masyarakat yang dinilai dengan IPM dipengaruhi oleh variabel opini audit.

Melalui penelitian ini, menunjukkan bahwa opini BPK dapat menjadi patokan kesejahteraan masyarakat yang merupakan output dari proses manajemen keuangan pemerintah. Untuk itu, hipotesis pertama penelitian ini adalah:

H1 : Opini BPK RI pada laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

2.2 Pengaruh Jumlah temuan BPK terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Selain opini audit, pemeriksaan BPK juga menghasilkan temuan audit. Temuan audit menurut Adinata (2023) menunjukkan adanya ketidaksesuaian pelaporan dan masih adanya celah perbaikan yang dapat dilakukan dalam kepatuhan terhadap peraturan dan pengendalian internal. Dalam penelitian ini disimpulkan bahwa, jumlah temuan dalam hasil pemeriksaan memberikan pengaruh negatif terhadap kesejahteraan Masyarakat. Dalam penelitian Mangkunegara (2015) menyatakan bahwa hasil pemeriksaan BPK berpengaruh negatif terhadap kinerja pemerintah dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan dua penelitian di atas, maka hipotesis kedua penelitian ini adalah:

H2 : Jumlah temuan BPK RI pada laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh negatif terhadap kesejahteraan masyarakat

2.3 Pengaruh Kinerja Keuangan terhadap Kesejahteraan Masyarakat

Hasil perhitungan rasio-rasio atas laporan keuangan dalam analisis kinerja keuangan menunjukkan kinerja pemerintah daerah dalam Pembangunan dan peningkatan kesejahteraan Masyarakat. Penilaian kinerja keuangan melalui perhitungan rasio ini sejalan dengan argumen Saragih dan Hasibuan (2020) menyatakan bahwa pemerintah yang memiliki kinerja keuangan yang baik menjadi syarat awal untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Selain itu, Suryaningsih dkk (2015) mengatakan bahwa kesuksesan dari pemerintah dalam mengelola keuangan daerah berdampak pada kenaikan pertumbuhan ekonomi per kapita, tingkat konsumsi dan berkurangnya gini rasio yang mempengaruhi tingkat kesehatan, pendidikan dan kehidupan sosial. Putry (2017) menyimpulkan bahwa kinerja keuangan suatu daerah berpengaruh secara positif terhadap kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan hubungan substantif dan hasil penelitian sebelumnya, dirumuskan hipotesis ketiga penelitian ini adalah:

H3 : Kinerja keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat

3. Metodologi Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Penelitian ini dirancang dengan pendekatan kuantitatif menggunakan model regresi linier berganda. Unit data yang digunakan adalah unit organisasi pemerintah provinsi di seluruh Indonesia sejak tahun 2018 hingga 2022. Model regresi linear berganda sesuai untuk menunjukkan dinamika dan kecenderungan perubahan yang terjadi akibat pengaruh variabel independen berupa hasil opini BPK, jumlah temuan BPK dan kinerja keuangan kepada variabel dependen Indeks Pembangunan Manusia di setiap provinsi dari waktu ke waktu. Penelitian dilakukan dengan menggunakan data sekunder. Data dalam penelitian ini berupa hasil perhitungan kinerja keuangan yang merupakan pengolahan data dari laporan keuangan tahunan Pemerintah Daerah, opini audit BPK dan jumlah temuan audit serta Indeks Pembangunan Masyarakat. Data tersebut diperoleh dari berbagai sumber: opini dan jumlah temuan BPK dikumpulkan dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK, kinerja keuangan pemerintah daerah diolah berdasarkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah setiap provinsi dan IPM diperoleh dari laporan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam website resminya. Penelitian ini menggunakan populasi yaitu 34 Provinsi di Negara Kesatuan Republik Indonesia selama kurun 2018 hingga 2022. Dengan menggunakan data lengkap dari 34 provinsi penelitian ini

memberikan gambaran yang lebih komprehensif dan menyeluruh dibandingkan penelitian sebelumnya.

3.2 Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Penelitian ini menggunakan Opini audit BPK dan jumlah temuan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah sebagai variabel independen yang bersumber dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan (IHPS) BPK. Untuk variabel independen kinerja keuangan menggunakan rasio derajat desentralisasi fiskal, rasio kemandirian keuangan daerah, rasio efektivitas PAD, dan rasio efisiensi keuangan daerah yang bersumber dari pengolahan data atas nilai dalam LKPD. Variabel kesejahteraan masyarakat yang dinilai dengan indeks pembangunan manusia dari setiap provinsi yang nilainya dihitung dan telah dipublikasi oleh Badan Pusat Statistik dalam website resminya menjadi variabel dependen yang digunakan dalam penelitian.

Variabel Dependen

Indeks pembangunan manusia menjadi variabel dependen dalam penelitian ini merupakan proksi kesejahteraan masyarakat daerah. IPM adalah representasi dari kesejahteraan masyarakat yang mencakup kesehatan, pendidikan dan standar hidup yang layak. Atas dasar tersebut nilai Indeks Pembangunan manusia menjadi variabel dependen yang tepat dalam mengukur kesejahteraan Masyarakat suatu wilayah. Semakin tinggi nilai indeks pembangunan manusia berarti makin tinggi pula kesejahteraan masyarakat daerahnya.

Variabel independen

1. Opini Audit BPK

Opini audit BPK merupakan nilai dari hasil audit opini yang dikeluarkan BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Data ini bersifat kualitatif sehingga perlu dikuantitatifkan menjadi data numerik agar dapat diolah secara statistik. Sebagaimana penelitian Adinata (2023) dan Precilia dan Mimba (2020) yang juga menggunakan opini audit, juga melakukan proses kuantifikasi data untuk melakukan pengujian statistik. Proses kuantifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan memberikan nilai 0 untuk opini dengan kategori tidak wajar (*adverse*), nilai 1 untuk opini dengan kategori tidak memberikan pendapat (*disclaimer*), nilai 2 untuk opini dengan kategori wajar dengan pengecualian (*qualified*), nilai 3 untuk opini dengan kategori wajar tanpa pengecualian (*unqualified*).

2. Jumlah Temuan BPK

Variabel jumlah temuan audit merupakan nilai yang tercantum dalam IHPS BPK yang berisi nilai temuan pemeriksaan BPK sebagai kasus yang ditemukan oleh auditor BPK yang memenuhi kriteria bahwa kasus tersebut telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan ataupun ketentuan pengendalian internal yang berlaku. Penelitian Tama dan Adi (2018) variabel temuan audit diukur dengan skala nominal berdasarkan jumlah temuan audit yang tertuang dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) BPK RI. Temuan audit terbagi atas dua alasan pelanggaran yaitu kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan temuan terhadap kelemahan SPI.

3. Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah

Kinerja keuangan pemerintah daerah dapat diukur melalui empat rasio utama yang telah diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 690.900.327 tahun 1996 tentang Pedoman Penilaian dan Kinerja Keuangan dengan menggunakan analisis efisiensi dan analisis efektivitas yaitu:

a. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal (RDDF) merupakan nilai yang menunjukkan jumlah tanggung jawab dan kewenangan pemerintah pusat yang diserahkan ke daerah. RDDF dihitung dengan:

$$\text{RDDF} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Penerimaan Daerah}} \times 100\%$$

b. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) merupakan perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dengan total penerimaan atas transfer yang diterima daerah. Penghitungan atas rasio tersebut diuraikan dengan persamaan berikut:

$$\text{RKKD} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat}} \times 100\%$$

c. Rasio Efektivitas PAD

Rasio Efektivitas PAD menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam merealisasikan PAD yang telah direncanakan sebelumnya dalam penganggaran PAD, yang dihitung dengan:

$$\text{Rasio Efektivitas PAD} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Anggaran Pendapatan Asli Daerah}} \times 100\%$$

d. Rasio Efisiensi Keuangan Daerah

Rasio Efisiensi Keuangan Daerah sebagai rasio yang digunakan untuk menunjukkan tingkat perbandingan antara besarnya biaya yang telah dikeluarkan untuk realisasi belanja daerah dengan realisasi pendapatan yang telah diterima. Siregar dan Mariana (2020) mengukur rasio efisiensi keuangan dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efisiensi Keuangan Daerah} = \frac{\text{Realisasi Belanja Daerah}}{\text{Realisasi Penerimaan PAD}} \times 100\%$$

Keempat rasio tersebut selanjutnya akan di olah menjadi satu dengan Analisis Komponen Utama (AKU), atau yang dikenal sebagai *Principal Component Analysis (PCA)*. AKU adalah teknik statistik multivariat yang digunakan untuk menyederhanakan data dengan cara mentransformasi data secara linier menjadi sistem koordinat baru dengan varians maksimum. Hasil dari teknik analisis komponen utama ini akan menghasilkan skor faktor yang menjadi variabel independen baru yang mewakili variabel kinerja keuangan daerah.

4. Pembahasan

4.1.1 Analisis Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif berkaitan dengan proses mendeskripsikan atau menjelaskan tentang gambaran objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi sehingga dapat menggambarkan karakter sampel yang digunakan. Data dalam penelitian ini adalah dari tahun 2018-2022. Tabel 7 memberikan gambaran umum tentang variabel penelitian. Statistik deskriptif memfokuskan kepada nilai maksimum, nilai minimum, nilai rata-rata (mean) dan nilai standar deviasi. Deskripti dari data-data selengkapnya dapat dilihat pada tabel 7 di bawah:

Tabel 1 Statistik Deskriptif

Variabel Pengamatan	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	170	60.06	82.77	71.3997	3.97313
Jumlah Temuan	170	.00	51.14x10 ¹⁰	2.19014x10 ¹⁰	5.74810
Opini	170	1.00	2.00	1.9706	.16946
RDDF	170	.04	.73	.3759	.15853
RKKD	170	.07	3.15	.7720	.55641
REfektifitas_PAD	170	.58	3.22	1.0471	.24247
REfisiensi_Keu	170	.74	1.22	.9935	.06398

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan Tabel 1 hasil Statistik deskriptif menunjukkan untuk nilai Indeks Pembangunan Manusia minimum yaitu 60.06 yang berarti bahwa kesejahteraan masyarakat terendah sudah berada pada level menengah menurut versi UNDP yang diperoleh untuk IPM Provinsi Papua pada tahun 2018. Untuk nilai maksimum IPM adalah 82.77 yang berada pada level sangat tinggi di mana nilai tersebut diperoleh untuk IPM Provinsi DKI Jakarta tahun 2022. Sedangkan untuk nilai rata-rata IPM adalah 71.39 yang sudah masuk dalam level tinggi menurut standar UNDP. Namun, rata-rata IPM Indonesia masih berada di bawah rata-rata global yaitu 73.90.

Untuk nilai Opini yang masih menunjukkan nilai WDP hanya 5 kabupaten yaitu Provinsi Kalimantan, Maluku, Sulawesi Selatan, Maluku Utara dan Papua. Sedangkan sisanya sudah menghasilkan opini WTP. Persebaran Opini Audit BPK dapat diamati dalam tabel 8 Frekuensi Opini BPK berikut:

Tabel 2 Frekuensi Opini BPK

Opini	Skoring Opini	Frekuensi
WTP	3	175
WDP	2	5
TW	1	0
TMP	0	0

Sumber: Hasil Olah Data Peneliti

Pada variabel jumlah temuan Pemeriksaan didapatkan nilai minimum sebesar 0 yang berarti pada tahun 2021 Provinsi Bali tidak ditemukan temuan pemeriksaan oleh tim BPK RI. Sedangkan jumlah temuan pemeriksaan terbesar terjadi pada Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2022 yaitu sebesar Rp511.423.839.530,49. Dengan nilai rata-rata jumlah temuan pemeriksaan atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi di Indonesia adalah sebesar Rp2.190.140.000,00. Rata-rata nilai jumlah temuan pemeriksaan BPK RI di setiap provinsi terlihat tidak terlalu besar dibanding dengan total realisasi APBD tahun 2022 sebesar 337,12 triliun rupiah atau sekitar 9,9 triliun rupiah.

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal atau RDDF menunjukkan angka minimum pada 0.04 yang berada pada kategori sangat kurang. Nilai ini diperoleh Provinsi Papua Barat pada tahun 2019 yang dapat dimaknai bahwa hanya 4% saja porsi PAD yang didapat Provinsi Papua Barat atas semua pendapatannya pada tahun tersebut. Nilai Maksimum RDDF diperoleh Provinsi Banten pada tahun 2022 yaitu 0.73 atau termasuk kategori sangat baik. Hal ini dimaknai bahwa sudah 73% atas seluruh pendapatan Provinsi Banten yang didapat sendiri melalui PAD pada tahun 2022. RDDF Indonesia rata-rata 0.3759 atau masuk dalam kategori cukup.

Selanjutnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah atau RKKD memiliki nilai minimum sebesar 0.07 yang masih masuk dalam kategori sangat kurang sedangkan nilai

maksimum sebesar 3.15 yang sudah melebihi kriteria sangat baik. dengan nilai mean 0.7720 dan standar deviasi sebesar 0.55641. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia memiliki tingkat kemandirian daerah yang tinggi walaupun masih ada pemerintah provinsi yang berada di kategori rendah sekali. Tingkat kemandirian yang tinggi diartikan bahwa daerah telah memiliki PAD yang hampir menyamai nilai bantuan dari pemerintah pusat. Nilai minimum dari variabel ini ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah provinsi Papua Barat pada tahun anggaran 2019 dan nilai maksimum ditunjukkan oleh rasio kemandirian keuangan daerah provinsi DKI Jakarta pada tahun anggaran 2019.

Kemudian untuk Rasio Efektivitas PAD memiliki nilai minimum sebesar 0.58 atau masih dalam kategori tidak efektif yang diperoleh Provinsi Sulawesi Barat pada tahun anggaran 2018. Hal ini dapat diartikan bahwa Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2018 memiliki perencanaan anggaran yang belum baik dikarenakan hanya mampu merealisasikan 58% dari total PAD yang direncanakannya. Nilai maksimum mencapai 3.22 atau sudah sangat melebihi kategori sangat efektif yang diperoleh provinsi Papua pada tahun 2019. Pada tahun 2019 berarti Provinsi Papua merealisasikan belanja tiga kali lipat lebih dari rencana penganggarnya. Rasio ini memiliki nilai mean sebesar 1.0471 dan standar deviasi sebesar 0,24247. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia telah berada pada kategori sangat efektif dalam melaksanakan perencanaan PAD-nya walaupun masih ada pemerintah provinsi yang masih berada di kategori tidak efektif. Semakin tinggi rasio ini maka menunjukkan semakin baik kinerja pemerintah daerah dalam mengoptimalkan potensi PAD-nya

Terakhir pada Rasio Efisiensi Keuangan memiliki nilai minimum sebesar 0.74 yang diperoleh provinsi Kalimantan Timur pada tahun anggaran 2022 dan nilai maksimum sebesar 1.22 pada provinsi Sulawesi Utara pada tahun anggaran 2020. Nilai minimum yang hanya masuk dalam kategori efisien dan maksimum berada pada level tidak efisien mengindikasikan bahwa pemerintah provinsi di Indonesia secara umum masih belum efisien menggunakan anggarannya dikarenakan nilai realisasi belanja daerah masih mendekati nilai PAD yang di dapat daerah tersebut. Dengan nilai mean sebesar 0.9935 dan standar deviasi sebesar 0.06398. Rasio ini menunjukkan semakin tinggi nilai rasio efisiensi keuangan, menunjukkan semakin baik kinerja daerah dalam mengelola keuangannya. Hal ini dapat diartikan bahwa rata-rata pemerintah provinsi di Indonesia masih berada di kategori tidak efisien dalam mengelola keuangan daerahnya.

4.1.2 Analisis Faktor

Analisis faktor yang digunakan merupakan analisis yang digunakan untuk membuat proksi kinerja keuangan dalam penelitian ini. Dalam kinerja keuangan terdapat empat rasio keuangan daerah, sehingga perlu dilakukan analisis *principal components* untuk mendapatkan satu nilai faktor sebagai variabel kinerja keuangan daerah. Dalam analisis faktor berdasarkan antara variabel menggunakan analisis KMO MSA. Hasil uji analisis faktor dengan bantuan SPSS dapat dilihat pada tabel 3 Uji KMO & Bartlet berikut :

Tabel 3 Uji KMO & Bartlet

KMO and Bartlett's Test			
Kaiser-Meyer-Olkin Adequacy.	Measure of	Sampling	.503
Bartlett's Test of Sphericity	Approx. Chi-Square	df	327.794
	Sig.		.000

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan hasil tabel 3 hasil uji KMO dan Bartlet diperoleh untuk nilai sig adalah 0.000 yang lebih kecil dari 0.05 maka dapat dinyatakan bahwa variabel baru hasil memenuhi syarat valid dan dapat digunakan untuk analisis.

Dari hasil uji KMO didapatkan nilai KMO sebesar 0.503. Syarat dapat dilanjutkannya proses analisis faktor adalah nilai KMO hitung lebih besar dari nilai KMO yaitu 0.5. Maka dari itu karena KMO lebih besar dari 0,5 maka proses analisis faktor dapat dilanjutkan.

4.1.3 Uji Asumsi Klasik

Asumsi klasik merupakan uji prasyarat yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melakukan analisis data. Dilakukannya uji asumsi klasik bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi data yang akan digunakan dalam penelitian. Uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, heteroskedastisitas, autokolerasi dan multikolinearitas. Berikut merupakan hasil dari masing-masing uji asumsi klasik yang ada dalam penelitian ini.

1. Uji Normalitas

Berikut adalah hasil dari uji normalitas. :

- Jika nilai probabilitas $\geq 0,05$, maka asumsi normalitas terpenuhi.
- Jika nilai probabilitas $\leq 0,05$, maka asumsi normalitas tidak terpenuhi.

Tabel 4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			170
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0E-7	
	Std. Deviation	2.91474536	
Most Extreme Differences	Absolute	.063	
	Positive	.063	
	Negative	-.036	
Kolmogorov-Smirnov Z	.816		
Asymp. Sig. (2-tailed)	.518		
a. Test distribution is Normal.			

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan hasil tabel 4 Dilakukan uji asumsi klasik dan menghasilkan data yang memenuhi uji normalitas. Berdasarkan tabel 4 diketahui nilai dari Unstandardized Residual ditemukan nilai 0.518 yang lebih besar dari 0.05. Hal ini berarti asumsi normalitas terpenuhi.

2. Uji Heteroskedastisitas

Berikut merupakan hasil dari uji heteroskedestisitas :

Tabel 5 Uji Heteroskedestisitas metode Glejser

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
	B	Std. Error	Beta			
(Constant)	2.741	1.817			1.508	.133
Opini	-.238	.914	-.020		-.261	.795
Jumlah Temuan	-.012	.030	-.035		-.407	.684
Kinerja_Keuangan_Daerah	-.161	.171	-.081		-.943	.347

Dependent Variable: Abs_Res

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Hasil uji heteroskedastisitas pada tabel 5 menunjukkan hasil bahwa nilai asymp sig dari masing-masing variabel lebih dari 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedstisitas pada residual varian.

3. Uji Multikolinearitas

Hasil uji multikolinearitas disajikan pada tabel 6 berikut:

Tabel 6 Uji Mutikolineariti

Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
(Constant)		
Opini	.973	1.028
Jumlah Temuan	.811	1.233
Kinerja_Keuangan_Daerah	.802	1.246

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan tabel 6 menunjukkan bahwa nilai tolerance lebih dari 0,1 dan nilai VIF kurang dari 10. Oleh karena itu dari hasil pengujian multikolinearitas pada Tabel 12 dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas antar variabel independen. Dengan demikian, asumsi multikolinearitas terpenuhi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 1 Uji Autokorelasi dengan Durbin Watson

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.656	.430	.420	3.02559	2.044

a. Predictors: (Constant), Kinerja_Keuangan_Daerah, Opini, Jumlah_Temuan
b. Dependent Variable: IPM

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan tabel 7 nilai dari statistik menunjukkan nilai untuk nilai durbin watson adalah 2.044. Nilai tersebut masih di antara 1.78 (Du) dan 2.21 (4-Du) maka tidak terjadi gejala autokorelasi.

4.2.1 Uji Koefisiensi Determinasi

Merupakan suatu nilai (nilai proporsi) yang mengukur seberapa jauh kemampuan variabel-variabel independen yang digunakan pada persamaan regresi, dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antar nol dan satu. Nilai *Adjusted R Square* yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas. Nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* yang kecil (mendekati nol) berarti kemampuan variabel-variabel bebas secara simultan dalam menerangkan variasi variabel terikat amat terbatas. Nilai koefisien determinasi *Adjusted R Square* yang mendekati satu berarti variabel-variabel bebas memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel terikat. Hasil Uji Koefisiensi Determinasi terlihat dalam tabel 8 berikut:

Tabel 2 Analisis Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted Square	R Std. Error of the Estimate
1	.656 ^a	.430	.420	3.02559

a. Predictors: (Constant), Kinerja_Keuangan_Daerah, Opini, Jumlah_Temuan

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan Tabel 8, diketahui bahwa nilai R-Squared sebesar 0.430. Nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa variabel independen mampu mempengaruhi variabel terikat sebesar 43%, sedangkan sisanya 57% dipengaruhi oleh variabel di luar penelitian.

4.2.2 Uji F

Uji simultan akan menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimasukkan secara bersama-sama atau simultan akan memiliki pengaruh terhadap variabel dependen. Pengujian hipotesis ini sering disebut dengan pengujian signifikansi keseluruhan terhadap regresi yang ingin menguji apakah Y secara linear berhubungan. Berdasarkan hasil *output* dapat disimpulkan hasilnya berikut:

- $H_0 \geq 0,05$ (ditolak) variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- $H_1 \leq 0,05$ (diterima) variabel independen secara bersama – sama berpengaruh terhadap variabel dependen.

Tabel 9 Analisis Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1148.198	3	382.733	41.810	.000 ^b
	Residual	1519.595	166	9.154		
	Total	2667.793	169			

a. Dependent Variable: IPM

b. Predictors: (Constant), Kinerja_Keuangan_Daerah, Opini, Jumlah Temuan

Sumber : Olah Data SPSS,2024

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 9 maka dapat diketahui nilai Prob (F-statistic) sebesar 0.000 yang lebih kecil 0.05 maka H_0 ditolak dan H_1 diterima sehingga dapat disimpulkan variabel independen secara bersama-sama berpengaruh terhadap variabel terikat.

4.2.3 Uji t

Uji parsial atau uji t merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen dengan variabel dependen. Uji parsial (Uji-t) digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel X (variabel bebas) terhadap (Y) pada perusahaan beberapa negara. Uji parsial dapat disimpulkan berdasarkan hipotesis sebagai berikut:

- Apabila nilai probabilitas ≥ 0.05 maka variabel X (independen) tidak memiliki pengaruh secara parsial terhadap variabel Y (dependen) dalam artian tidak signifikan.
- Apabila nilai probabilitas ≤ 0.05 maka variabel X (independen) berpengaruh secara parsial terhadap variabel Y (dependen) dalam artian variabel independen memiliki pengaruh yang signifikan. Berikut merupakan output uji-t yang diambil dari pemilihan Regresi Random.

Penelitian ini menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. Analisis regresi berganda berfungsi untuk mengukur pengaruh antara lebih dari satu variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengetahui pengaruh x dan y yang diproyeksikan dengan model regresi berdasarkan Tabel 16 diperoleh persamaan sebagai berikut:

$$Y = 67.112 + 2.072 \text{ OA} - 0.094 \text{ JT} + 2.276 \text{ KKD}$$

Tabel 3 Uji t Parsial

Model	Prediksi arah	Unstandardize d Coefficients B	t	Sig.		Hipotesis
				Two tailed	One tailed	
(Constant)		67.112	24.250	.000	0.000	
Opini	+	2.072	1.488	.139	0.069	Diterima
Jumlah_Temuan	-	-.094	-2.087	.038	0.019	Diterima
Kinerja_Keuangan_Daerah	+	2.276	8.760	.000	0.000	Diterima

Sumber : Olah Data SPSS,2024

1. Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan nilai X1 atau Opini memiliki nilai koefisien 2.072 dengan nilai sig 0.139 (> 0.10) maka dapat dinyatakan bahwa Opini Audit berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat. (H1 Diterima)
2. Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan nilai X2 atau Jumlah Temuan memiliki nilai koefisien 0.094 dengan nilai sig 0.038 (< 0.05) dan t hitung 2.087 ($> t$ tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa jumlah temuan memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. (H2 Diterima)
3. Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan nilai X3 atau Kinerja Keuangan daerah memiliki nilai koefisien 2.276 dengan nilai sig 0.000 (< 0.05) dan t hitung 8.760 ($> t$ tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa kinerja keuangan daerah memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat. (H3 Diterima).

Pembahasan dalam penelitian ini adalah terkait pengaruh kinerja keuangan daerah dan hasil pemeriksaan BPK terhadap indeks pengetahuan masyarakat daerah. Adapun hasil pembahasan adalah sebagai berikut :

4.3.1 Pengaruh Opini BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan Opini memiliki nilai koefisien 2.072 dengan nilai sig 0.139 (> 0.10). Hasil tersebut menunjukkan bahwa pengaruh opini BPK RI memberikan pengaruh positif signifikan. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Adinata (2023) opini BPK RI memberikan pengaruh positif yang signifikan terhadap kesejahteraan daerah. Opini memberikan jaminan bahwa laporan keuangan pemerintah daerah telah sesuai dengan aturan dan standar akuntansi pemerintah. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah dinilai oleh BPK berarti keuangan daerah telah digunakan sesuai tujuan awal yang salah satunya adalah mencapai kesejahteraan masyarakat sehingga hasil audit yang baik berarti tingkat kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Penelitian lain oleh Makmum & Rahayu (2018) IPM memang memiliki hubungan secara tidak langsung dengan Opini BPK RI, karena semakin tinggi IPM daerah maka kemungkinan besar pemerintah provinsi semakin besar dalam memperhatikan masyarakatnya. Perhatian yang lebih besar ini akan mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di daerahnya.

4.3.2 Pengaruh Jumlah Temuan BPK RI pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan Jumlah Temuan Pemeriksaan memiliki nilai koefisien - 0.094 dengan nilai sig 0.038 (< 0.05) dan t hitung 2.087 ($> t$ tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa jumlah temuan pemeriksaan memberikan pengaruh negatif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian Adinita (2023) di mana hasil penelitiannya menyebutkan bahwa temuan audit memberikan pengaruh yang nyata terhadap kesejahteraan masyarakat daerah. Temuan audit mencerminkan adanya ketidaksesuaian dan ruang perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang dapat dilakukan pemerintah daerah berdasarkan ketentuan standar akuntansi pemerintahan, kebutuhan pengungkapan, sistem pengendalian intern (SPI), dan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku sehingga dapat mengurangi efektivitas peran pemerintah dalam menyejahterakan masyarakat (Kurnia, 2020). Semakin banyak pelanggaran atas ketentuan SPI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dilakukan oleh pemerintah daerah, semakin buruk kinerja pemerintah daerah tersebut (Sudarsana & Rahardjo, 2013). Hubungan negatif yang ditimbulkan dari temuan pemeriksaan terhadap IPM daerah mengartikan bahwa semakin tinggi jumlah temuan BPK RI terhadap pemerintah daerah maka menyebabkan IPM menurun. Menurunnya IPM dikarenakan adanya kemungkinan keuangan daerah tidak digunakan untuk mencapai tujuan kinerja pemerintah daerah dan semakin rendah kekayaan daerah maka pengungkapan informasi keuangan daerah semakin rendah (Aggatha dkk 2023).

4.3.3 Pengaruh Kinerja keuangan daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berpengaruh positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil tabel 10 menunjukkan nilai Kinerja Keuangan daerah memiliki nilai koefisien 2.276 dengan nilai sig 0.000 (< 0.05) dan t hitung 8.760 ($> t$ tabel (1.97) maka dapat dinyatakan bahwa jumlah temuan pemeriksaan memberikan pengaruh positif dan signifikan atau memberikan pengaruh yang nyata. Hasil penelitian sejalan dengan penelitian Siregar (2023) yang menyebutkan bahwa kinerja keuangan daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap IPM di daerah pemekaran. Hasil tersebut juga sesuai dengan penelitian terdahulu Suranta dkk., (2019) dan Winarni dkk, (2022), yang juga menyebutkan bahwa kinerja keuangan pemerintah yang diukur dengan rasio kemandirian keuangan daerah berpengaruh positif terhadap Indeks. Kinerja keuangan daerah merupakan bagian terpenting. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang direncanakan, maka kinerjanya rendah (Armaja & Aliyamin, 2017). Berdasarkan hasil menunjukkan hubungan yang positif artinya dari kinerja keuangan daerah meningkatkan kesejahteraan masyarakat daerah. Apabila sebuah daerah memiliki kecukupan keuangan daerah dan tepat digunakan untuk kesejahteraan rakyatnya maka akan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Kinerja keuangan pemerintah daerah dengan rasio keuangan merupakan kemampuan pemerintah daerah sebagai modal membiayai kegiatan pemerintah, pembangunan, serta pelayanan terhadap masyarakat (Winarni dkk, 2022), selain itu menyebutkan bahwa ketika ekonomi daerah meningkat maka juga meningkatkan kinerja keuangan daerah tersebut

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Dari hasil penelitian dapat dinyatakan bahwa hipotesis pertama yaitu pengaruh opini terhadap kesejahteraan masyarakat memberikan pengaruh positif atau hipotesis pertama

- diterima. Hal ini berarti bahwa adanya pengaruh positif antara opini yang diberikan BPK RI terhadap kesejahteraan masyarakat daerah.
2. Hasil penelitian menyatakan bahwa hipotesis kedua yaitu pengaruh jumlah temuan pemeriksaan BPK RI terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh negatif sehingga hipotesis diterima. Dapat diartikan bahwa semakin kecilnya jumlah temuan pemeriksaan BPK RI akan mengindikasikan kenaikan tingkat kesejahteraan masyarakat daerah.
 3. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hipotesis ketiga yaitu pengaruh kinerja keuangan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat memiliki pengaruh positif yang berarti hipotesis terakhir diterima. Hasil penelitian ini juga dapat diartikan bahwa semakin baik nilai kinerja keuangan daerah maka semakin baik pula kesejahteraan masyarakat daerahnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abadi, A. F. P., Utomo, S. W., & Yusdita, E. E. (2020). Studi Perilaku Konsumtif Pada Mahasiswa Pendidikan Akuntansi. *Jurnal Benefita*, 5(2), 264. <https://doi.org/10.22216/jbe.v5i2.4625>
- Abdullah, Z., Samawa, U., Besar, S., Info, A., History, A., Analysis, C., & Money, E. (2023). Hubungan Kausalitas Penggunaan E-Money Dengan Tingkat Konsumsi Mahasiswa. *Jurnal Riset Dan Kajian Manajemen*, 3, 1–10.
- Adiputra, R., & Moningka, C. (2012). Gambaran Perilaku Konsumtif Terhadap Sepatu Pada Perempuan Dewasa Awal. *Psibernetika*, Vol. 5(2), h. 76-93.
- Adliyani, Z. O. N. (2015). Pengaruh Perilaku Individu terhadap Hidup Sehat. *Perubahan Perilaku Dan Konsep Diri Remaja Yang Sulit Bergaul Setelah Menjalani Pelatihan Keterampilan Sosial*, 4(7), 109–114.
- Anggraini, R. T., & Santhoso, F. H. (2019). Hubungan antara Gaya Hidup Hedonis dengan Perilaku Konsumtif pada Remaja. *Gajah Mada Journal of Psychology (GamaJoP)*, 3(3), 131. <https://doi.org/10.22146/gamajop.44104>
- Anggreini, R., & Mariyanti, S. (2014). Hubungan Antara Kontrol Diri Dan Perilaku Konsumtif Mahasiswa Universitas Esa Unggul. *Jurnal Psikologi Media Ilmiah Psikologi*, 12(1), 34–42.
- Aqila, V. (2020). *Hubungan konformitas dengan perilaku konsumtif pada kelompok arisan cafe uma* 84. 1–61.
- Dewi, L. G. K., Herawati, N. T., & Adiputra, I. M. P. (2021). Penggunaan E-Money Terhadap Perilaku Konsumtif Mahasiswa Yang Dimediasi Kontrol Diri. *EKUITAS (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan)*, 5(1), 1–19. <https://doi.org/10.24034/j25485024.y2021.v5.i1.4669>
- Dona, H. R., & Khaidir, A. (2019). Implementasi Pengelolaan Keuangan Dengan Transaksi Non Tunai Di Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 56–70. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.5>
- Fatimah, S. N., & Fathihani, F. (2023). Pengaruh Literasi Keuangan, Gaya Hidup, dan Locus of Control Terhadap Perilaku Keuangan Generasi Z pada Cashless Society. *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 4(6), 868–877.
- Fatmawati, M. N. R., & Yuliana, I. (2019). Pengaruh Transaksi Non Tunai terhadap Jumlah Uang Beredar di Indonesia Tahun 2015-2018 dengan Inflasi Sebagai Variabel Moderasi. *Ekspansi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan, Dan Akuntansi*, 11(2), 269–283. <https://doi.org/doi.org/10.35313/ekspansi.v11i2.1608>